

02 GOVERNMENT
Prabowo Sudah Tekan Perpres
Badan Penerimaan Negara**05 NUSANTARA**
Harga Migor Meroket, Produsen
Didesak Produksi 2 Kali Lipat**10 LISTSTYLE**
Kunjungi Istana Dinasti Joseon
Warisan Budaya dan Sejarah Korea**Bukan Kebakaran
tapi Pembersihan**

PEJABAT sementara Area Manager Communication, Relations and CSR PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap Sunaryo Adi Putra memastikan tidak ada kebakaran tangki 38T-101 di Kilang Cilacap seperti dalam video yang beredar melalui media sosial. Tangki tersebut dikatakan sedang menjalani pembersihan sludge (lumpur). Secara kebetulan pada hari Kamis (27/2/2025), sekitar pukul 11.00 WIB, terjadi flash atau percikan api. Tim pemadam kebakaran Kilang Cilacap dipastikan telah melakukan penanganan dan tangki dalam proses pendinginan. (tangkap layar@aa)

Kait Kelindan Riza Chalid di Korupsi Kuadriliun Pertamina

Dalam tiga hari terakhir nama taipan minyak, Muhammad Riza Chalid mencuat seiring dengan pengungkapan dugaan korupsi Pertamina. Dari total 9 tersangka, salah satunya adalah pengusaha Muhammad Kerry Adrianto Riza, yang merupakan putra Riza Chalid. Terbaru, Kejaksanaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023 tersebut. Dua diantaranya adalah rumah Riza Chalid berlokasi di Jalan Panglima Polim, Melawai dan Jalan Jenggala II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Satu lagi di PT Orbit Terminal Merak yang berlokasi Cilegon, Banten. Ia menyebut perusahaan itu diduga menjadi lokasi tempat proses blending produk kilang jenis RON 88 Premium dengan RON 92. Dalam perhitungan sementara yang diupdate Kejagung, kerugian negara dalam kasus ini pada tahun 2023 saja mencapai Rp 193,7 triliun. Jika pola yang sama terjadi sejak 2018, maka total kerugian selama lima tahun bisa mendekati Rp 1 kuadriliun--dengan 15 angka nol alias Rp 1.000 triliun. Kejagung pun membuka kemungkinan memeriksa Riza Chalid. Pasalnya, ada kait kelindan setelah penggeledahan berhasil sejumlah dokumen dan uang tunai sebesar Rp 833 juta dan uang tunai dalam bentuk mata uang asing sebesar US\$ 1.500. Pengusaha yang mendapat julukan 'The Gasoline Godfather' ini memang pernah beberapa kali disebut-sebut dalam kasus serupa. Salah satunya adalah skandal Petral, anak usaha Pertamina yang berbasis di Singapura.

Baca Hal 11....

Daftar Megakorupsi di Indonesia

- 1. Korupsi Pertamina (Rp 968,5 Triliun)**
Kerugian akibat ekspor ilegal, impor kompensasi BBM salah prosedur, dan subsidi tidak tepat sasaran (2018-2023).
- 2. Kasus PT Timah (Rp 300 Triliun)**
Korupsi izin usaha pertambangan PT Timah (2015-2022).
- 3. Kasus BLBI (Rp 138 Triliun)**
BLBI masa krisis 1997 tidak dikembalikan.
- 4. Penyerobotan Lahan PT Duta Palma (Rp 78 Triliun)**
Surya Darmadi menyerobot lahan di Riau.
- 5. Kasus PT TPPI (Rp 37,8 Triliun)**
Pengolahan kondensat ilegal di kilang Tuban (2009-2011).
- 6. Korupsi PT Asabri (Rp 22,7 Triliun)**
Manipulasi transaksi saham dan reksadana.
- 7. Kasus PT Jiwasraya (Rp 16,8 Triliun)**
Gagal bayar polis.
- 8. Korupsi Ekspor Minyak Sawit (Rp 12 Triliun)**
Korupsi izin ekspor CPO dan turunannya.
- 9. Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda (Rp 9,37 Triliun)**
Mark-up harga pengadaan pesawat.
- 10. Korupsi Proyek BTS 4G (Rp 8 Triliun)**
Penyimpangan dalam proyek BTS 4G BAKTI.
- 11. Korupsi Bank Century (Rp 7 Triliun)**
Dana talangan FPJP dan kebijakan bank berdampak sistemik.

Prabowo Sudah Teken Perpres Badan Penerimaan Negara

JAKARTA - Ambisi Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara tak surut meski pada awal tahun ini belum tampak akan terlaksana. Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) nyatanya tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Lembaga ini sempat redup pembahasannya usai Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi menteri keuangan. Sri Mulyani disebut menolak pemisahan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan untuk dilebur ke Badan Penerimaan Negara.

Dalam dokumen itu disebutkan bahwa dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045, diperlukan kebijakan fiskal yang adaptif dan ruang fiskal memadai agar memberikan stimulus terhadap perekonomian. Salah satu kunci untuk meningkatkan ruang fiskal yang dimaksud ialah melalui peningkatan pendapatan negara, baik perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Rendahnya pendapatan negara di Indonesia saat ini disebabkan masih adanya kesenjangan mencakup aspek administrasi maupun kebijakan yang memerlukan transformasi tata kelola kelembagaan sebagai enabler untuk optimalisasi pendapatan negara,” seperti dikutip dari Perpres Nomor 12 Tahun 2025, Kamis (27/2/2025).

Dalam konteks perpajakan, Prabowo mengharapkan pembenahan tata kelola kelembagaan untuk dapat mengimplementasikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) secara terintegrasi, meningkatkan pelayanan dan kepatuhan perpajakan, serta mewujudkan inisiatif berbagai kebijakan penerimaan perpajakan yang adil, efisien, berdaya saing, dan optimal.

Sementara itu, terkait PNBP, pembenahan tata kelola disebut diperlukan untuk mendorong optimalisasi PNBP dengan menjaga mutu layanan publik, mendorong transparansi dan akuntabilitas, memicu pendapatan dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), optimalisasi aset, serta optimalisasi sumber daya alam (SDA) dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam lima tahun ke-pemimpinannya ke depan, Prabowo berencana melakukan penataan kelembagaan pendapatan negara melalui beberapa tahapan, meliputi



perencanaan dan persiapan, yang mencakup reformasi administrasi penyempurnaan proses bisnis; serta internalisasi tata kelola atau sistem baru untuk efektivitas administrasi dan kelembagaan.

Kemudian, tahapan penataan kelembagaan pendapatan negara melalui implementasi secara menyeluruh disertai dengan peninjauan efektivitas tata kelola atau sistem pengumpulan pendapatan negara terhadap pencapaian target rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto (PDB), serta dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan nasional.

“Adapun highlight (sorotan) intervensi dari mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB menuju 23 persen termuat dalam infografis,” demikian petikan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 yang diteken di Jakarta pada Senin, 10 Februari 2025.

Sebelumnya, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka pernah menuliskan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara dalam dokumen visi misinya sebagai capres dan cawapres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, terutama pada bagian 8 program hasil terbaik cepat. Mereka menyebutkan bahwa jika terpilih, maka akan mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan terhadap PDB ke 23 persen.

“Sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak,” tulis Prabowo-Gibran.

Oleh karena itu, tertulis dalam dokumen, menurut mereka, negara membutuhkan terobosan nyata dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. “Pendirian

Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23 persen,” seperti dikutip dari dokumen visi misi Prabowo-Gibran.

Pengamat Nilai Belum Serius

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono melihat secara keseluruhan dalam Perpres tersebut, masih belum ada arah yang jelas dan perincian terkait rencana pembentukan BPN dan target rasio pajak hingga 23%.

“Pemerintahan sekarang ini masih belum serius untuk membentuk BPN guna mencapai target rasio pajak di 23%,” tuturnya, Kamis (27/2/2025).

Mengacu lampiran Perpres No.12/2025, sudah diuraikan infografis tentang highlight intervensi untuk mendirikan BPN dan meningkatkan rasio pajak menjadi 23%. Akan tetapi, menurut Prianto infografis tersebut masih terlalu sederhana dan tidak menggambarkan rencana membentuk BPN dan cara meningkatkan rasio pajak hingga 23%.

Secara spesifik pun, narasi pendirian BPN dan target rasio pajak 23% itu ada Prioritas Nasional 7 yang didukung oleh program hasil terbaik cepat. Namun demikian, jika dilihat kerangka regulasi dan kelembagaan di Prioritas Nasional 7, tidak ada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pendirian BPN.

Prianto melihat kondisi saat ini, bahwa Kementerian Keuangan masih enggan untuk memisahkan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kemenkeu.

Menurutnya, alasan Kemenkeu cukup logis. Pasalnya memisahkan fungsi penerimaan dan fungsi belanja di APBN itu jauh lebih sulit dari kondisi ketika kedua fungsi tersebut masih berada di satu atap Kemenkeu. Prianto menyampaikan tidak disebutkan pula

Rincian intervensi kebijakan untuk mendulang penerimaan negara lebih tinggi dari mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23% adalah sebagai berikut:

1. Sasaran dan indikator

- Persentase penambahan wajib pajak hasil ekstensifikasi berdasarkan target kinerja organisasi 90% pada 2029.

- Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak badan dan orang pribadi 100% pada 2029

- Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara 100% pada 2029.

2. Indikasi highlight intervensi

- Implementasi sistem informasi inti perpajakan atau coretax dan interoperabilitas dengan sistem informasi stakeholder terkait menuju data driven.

- Simplifikasi proses bisnis dan kelembagaan serta penguatan kebijakan

- Pembenahan tata kelola ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan termasuk sin tax

- Peningkatan kepatuhan perpajakan

3. Instansi pelaksana

- Kementerian Keuangan

4. Indikasi lokasi prioritas

- Nasional

dalam RPJMN, terkait kapan waktu dan kondisi ekonomi yang tepat untuk membentuk BPN selama periode 2025-2029 ini.

“Ketika ditanya kapan waktu yang tepat bagi pemerintahan sekarang ini membentuk BPN, semuanya tergantung political will dari pemerintahan. Ketika Menkeu sekarang masih tidak berubah, sepertinya BPN hanya akan sebatas omon-omon berdasarkan alasan logis di atas,” lanjut Prianto.

Dalam RPJMN tersebut, pemerintah menyinggung cara menaikkan rasio penerimaan negara hingga 23% terhadap PDB itu yaitu dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan. RPJMN pun menargetkan tiga capaian. Pertama, penambahan wajib pajak hingga 90% pada 2029. Kedua, tingkat kepatuhan pajak penyampaian SPT Tahunan mencapai 100% pada 2029. Ketiga, indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara 100% pada 2029. (wid, rls, ist, kum/dya)

16 Daerah Tak Miliki Dana Pilkada Ulang

JAKARTA –Di Pilkada 2024, terdapat 24 daerah yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghelat pemungutan suara ulang (PSU). Bahkan, 14 daerah diantaranya wajib coblosan ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa ada 16 daerah yang tidak memiliki dana untuk menggelar Pilkada ulang tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menjelaskan, hanya 7 daerah yang tercatat masih memiliki anggaran untuk melaksanakan PSU.

"Daerah yang sanggup untuk pelaksanaan, atau memiliki dana itu ada sekitar 8 daerah," ujar Ribka dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Kamis (27/2/2025).

Adapun kedelapan daerah yang siap melaksanakan PSU adalah Kabupaten Bungo, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Banggai.

Sementara itu, lanjut Ribka, sebanyak 16 daerah lainnya dinyatakan tidak memiliki cukup dana atau masih membutuhkan bantuan anggaran, baik dari provinsi maupun pemerintah pusat. "Sedangkan daerah yang tidak sanggup atau masih membutuhkan bantuan dana, baik dari provinsi maupun APBN, terdapat ada 16 daerah," kata Ribka.

Selain itu, terdapat dua daerah tambahan yang harus menggelar PSU karena kolom kotak kosong yang menang Pilkada, yakni Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

Menurut Ribka, Kemendagri akan mendorong pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran dalam APBD Perubahan 2025, agar terdapat alokasi dana pelaksanaan PSU.

"Kemendagri akan mengusulkan agar pemerintah daerah dapat memenuhi penganggaran kebutuhan pendanaan PSU dalam APBD TA 2025 melalui penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja dalam APBD TA 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025," kata Ribka.

Lebih lanjut, Kemendagri juga akan mendorong pemda agar mengalokasikan dana PSU dari anggaran tak terduga (BTT) daerah.

"Kemendagri akan mendorong pemda memaksimalkan, mengoptimalkan, kemudian memprioritaskan dana-dana yang tidak digunakan untuk kepentingan lain, kiranya disiapkan di BTT daerah," tegas Ribka.

Meski begitu, Ribka mengakui banyak daerah yang masih menunggu kepastian dukungan dari pemerintah

pusat, karena dana dari provinsi pun belum sepenuhnya tersedia.

Oleh karena itu, Kemendagri meminta dukungan DPR RI agar ada tambahan anggaran dalam APBD untuk daerah yang minim dana PSU. "Kami mohon dukungan dari DPR RI, kami mendorong supaya ada penambahan pos APBD untuk daerah yang minim untuk PSU," pungkasnya.

DPR Estimasi Butuh Rp 750 M

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan mengatakan kebutuhan anggaran untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi mencapai sekitar Rp 750 miliar.

Jumlah tersebut merupakan kebutuhan dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, hingga kebutuhan pengamanan untuk TNI dan Polri.

"Usulan anggaran yang tadi sudah disampaikan baik KPU maupun



Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Ant)

Bawaslu kurang lebih sekitar Rp750 miliar dan kemungkinan bisa bertambah ketika ada pengamanan yang lainnya," kata Dede kepada awak media usai rapat bersama mitra komisinya di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis (27/2/2025).

Dalam rapat, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan ketersediaan anggaran Bawaslu kabupaten/kota tersisa sekitar Rp 35,8 miliar. Sementara kebutuhan untuk pengawasan PSU ia perkirakan sebesar Rp 251,9 miliar. Sehingga ada kekurangan dana sekitar Rp 216 miliar.

Menurut dia, penyelenggaraan pengawasan terhadap PSU di sekitar

DAERAH-DAERAH YANG TAK MILIKI ANGGARAN PSU

1. Provinsi Papua
2. Kabupaten Kepulauan Talaud
3. Kabupaten Buru
4. Kabupaten Pulau Taliabu
5. Kabupaten Pasaman
6. Kabupaten Empat Lawang
7. Kabupaten Pesawaran
8. Kabupaten Bengkulu Selatan
9. Kabupaten Serang
10. Kabupaten Tasikmalaya
11. Kabupaten Boven Digoel
12. Kabupaten Gorontalo Utara
13. Kabupaten Parigi Moutong
14. Kota Banjarbaru
15. Kota Palopo
16. Kota Sabang

24 daerah perlu dukungan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Selain itu, penyelenggaraan PSU dilakukan menggunakan sisa dana hibah dari APBD untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 lalu.

"Tapi sudah banyak pemda (pemerintah daerah) yang meminta dana yang sisa tersebut untuk dikembalikan ke pemda," kata Bagja. (din, ist, rls, ant/dya)

KPU Usul Coblosan Ulang Digelar Hari Sabtu

KPU RI menyampaikan usulan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 Pilkada. Komisioner KPU Idham Holik mengusulkan jadwal PSU 24 Pilkada digelar pada hari Sabtu.

Usulan itu disampaikan KPU dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Rapat digelar untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).

"Secara keseluruhan usulan tanggal pemungutan suara sebagai berikut. Untuk (tenggat waktu) 30 hari, ini tanggal 22 Maret 2025, 45 hari tanggal 5 April 2025, 60 hari tanggal 19 April 2025, 90 hari tanggal 24 Mei 2025 dan 180 hari tanggal 9 Agustus 2025," kata Idham.

Idham kemudian menyampaikan alasan pemilihan hari Sabtu untuk gelaran PSU. Dia menyebut, tidak ada kebijakan hari libur untuk PSU lantaran bersifat lokal, sehingga dipilih hari pada akhir pekan.

"Hari Sabtu menjadi pilihan kebijakan kami karena pertimbangannya hari libur, tidak perlu ada kebijakan hari yang diliburkan," katanya.

"Dan sebagaimana faktor sosiologis pada hari Sabtu masyarakat biasanya lebih banyak di rumah, sehingga memungkinkan menggunakan hak pilihnya dan kami harapkan partisipasi dapat meningkat," lanjut dia.

Sebelumnya, MK telah membatalkan putusan 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024. Hasilnya, MK memerintahkan ada pencoblosan ulang di 24 pilkada.

MK membatalkan hasil Pilkada di 24 daerah karena ada calon yang didiskualifikasi. Mereka didiskualifikasi dengan berbagai alasan, mulai dari tak ngaku sebagai mantan terpidana, tak tamat SMA, hingga sudah menjabat 2 periode.

Kemudian, ada satu perkara yang diputuskan agar dilakukan rekapitulasi ulang dan satu perkara yang diminta untuk perbaikan



Komisioner KPU Idham Holik

USULAN TANGGAL PSU DARI KPU:

-  Durasi 30 hari (Sabtu, 22 Maret 2025)
-  Durasi 45 hari (Sabtu, 5 April 2025)
-  Durasi 60 hari (Sabtu, 19 April 2025)
-  Durasi 90 hari (Sabtu, 24 Mei 2025)
-  Durasi 180 hari (Sabtu, 9 Agustus 2025)

Keputusan KPU tentang penetapan hasil pilkada. Sementara, 14 gugatan lainnya tidak dikabulkan MK. (din, dtc, ist/dya)

Harga Migor Meroket, Produsen Didesak Produksi 2 Kali Lipat

JAKARTA — Harga minyak goreng rakyat Minyakita hingga cabai rawit merah secara nasional masih melambung di atas harga eceran tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) menjelang Ramadan atau puasa 2025.

Terpantau stabil sesuai data di laman resmi panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (27/2/2025) pukul 08.55 WIB. Harga rata-rata Minyakita dibanderol Rp17.614 per liter di tingkat konsumen.

Ini artinya, harga Minyakita masih di atas HET Rp15.700 per liter secara nasional. Harga rata-rata untuk minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing adalah Rp20.225 per liter dan Rp17.560 per liter di tingkat konsumen.

Pemerintah telah meminta produsen minyak goreng untuk menambah produksi minyak kemasan sederhana atau Minyakita menjadi 2 kali lipat. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan produksi Minyakita dalam sebulan 180 ribu ton sampai 190 ribu ton.

Jika dikalikan 2 kali lipat produksinya, maka sekitar 360 ribu ton sampai 380 ribu ton, hampir 400 ribu ton. Dengan begitu harga Minyakita yang kini masih mahal diharapkan bisa segera menurun.

"Kan rata-rata produksi per bulan, itu kan 180 ribu sampai 190 ribu ton. Kali dua aja," kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Kamis (27/2/2025).

Penambahan produksi Minyakita ini juga dilakukan selama Ramadan karena permintaan diprediksi akan mengalami peningkatan. Untuk mengantisipasi menipisnya stok dan kenaikan harga, produksi diperlukan lebih banyak.

"Karena kan selama ini, kita harus membedakan kebutuhan di saat bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Di bulan Ramadan itu rata-rata demannya meningkat minimal dua kali lipat. Nah oleh karena itu Minyakita juga kita bilang minta ke produsen untuk menaikkan produksinya," ungkapnya.

Dalam catatan Kemendag, harga Minyakita secara rata-rata nasional masih di level Rp 17.200/liter. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita di konsumen ditetapkan Kemendag Rp 15.700/liter.

Sebagai langkah intervensi harga Minyakita, pemerintah juga mengimbau BUMN pangan untuk mendistribusikan komoditas tersebut ke pasaran. Perum Bulog juga mendapatkan penugasan penyaluran Minyakita sebanyak 50 ribu kilo liter dan ID Food mendapatkan pengadaan sebanyak 20 ribu kilo liter.

Jika dirinci, harga Minyakita tertinggi terjadi di wilayah Indonesia



Pengemasan Minyakita di salah satu perusahaan pengemasan di di Bandarlampung.(ant)

Timur, tepatnya di Papua Tengah yang mencapai Rp19.600 per liter atau dengan disparitas 24,84% dari HET.

Sementara itu, Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan harga Minyakita terendah atau senilai Rp16.626 per liter, meski harganya masih di atas HET.

Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan perusahaan memiliki alokasi stok Minyakita untuk dapat didistribusikan ke berbagai daerah. Adapun, ID Food mendapatkan penugasan pengadaan Minyakita sebanyak 50.000 kilo liter selama operasi pasar saat puasa dan

Idulfitri.

Sis menuturkan bahwa ID Food bersama dengan PT Pos, Bulog, dan PTPN bersinergi dalam mendistribusikan Minyakita melalui operasi pasar dengan harga di bawah HET.

"Ada kontradiksi harga di pasar itu masih Rp17.000 per liter, kemarin rapat dengan Menko Pangan, Menteri Perdagangan, kami juga diminta untuk masuk ke pasar-pasar," ujarnya.

Alhasil, ID Food juga akan menjadi distributor lini kedua (D2) untuk mendistribusikan Minyakita di pasar tradisional.(wid,rls,ist/dya)

PERUBAHAN HARGA MINYAK GORENG (27/2/2025)

Minyak Goreng Curah

RP 18.700 PER KG

↑ 0.27% - Rp 50

Minyak Goreng Kemasan Bermerek 1

RP 22.100 PER KG

↑ 0.23% - Rp 50

Minyak Goreng Kemasan Bermerek 2

RP 21.000 PER KG

↑ 0.24% - Rp 50

Sumber:BI.go.id

Bahan Pangan Aman, Khofifah Minta Warga Jatim Tak Panic Buying

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian kebutuhan pokok secara berlebihan atau panic buying jelang Ramadan.

Khofifah memastikan stok bahan pangan dan kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan bahkan hingga Lebaran Idulfitri di Jatim masih mencukupi.

"Alhamdulillah, stok kebutuhan pokok di Jawa Timur aman dan terkendali. Kami telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar. Untuk itu saya mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan bijak dalam berbelanja. Tidak perlu melakukan aksi borong atau panic buying," ujar Khofifah melalui keterangannya, Kamis (27/2/2025).

Khofifah menyampaikan Pemprov Jatim bersama instansi terkait terus memantau harga dan ketersediaan barang di pasar. Ia pun mengakui ada sejumlah harga komoditas pangan yang naik.

"Memang saat ini ada sejumlah

komoditas yang mengalami sedikit kenaikan harga. Seperti cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah, serta telur ayam dan daging ayam," ucapnya.

Meski ada tren kenaikan harga, ia menegaskan stok dalam kondisi aman. Kenaikan itu menurutnya biasa terjadi menjelang Ramadan, dan bakal berlangsung normal pada awal bulan puasa, kecuali cabai.

Rincinya yaitu cabai rawit harga di pasar saat ini Rp80.512 per kg. Harga ini naik signifikan karena harga acuan atau HET nya adalah Rp40 ribu- Rp57 ribu per kg.

Begitu juga dengan cabai merah besar. Harga di pasaran saat ini adalah Rp48.645 per kg. Harga ini naik dibandingkan harga normalnya di kisaran Rp41.886 per kg.

Sedangkan bawang merah diketahui harga di pasar saat ini adalah Rp30.609 per kg. Angka tersebut, kata Khofifah, naik dibandingkan 14 hari terakhir namun masih di bawah HET. Kecenderungan kenaikan harga juga terjadi untuk telur ayam dan daging ayam.

"Namun prinsipnya stoknya

aman. Sehingga tak perlu ada panic buying atau aksi borong. Yang dikhawatirkan jika ada aksi borong justru akan mengganggu stabilitas yang justru akan membuat harga bapak menjadi naik, sebagaimana prinsip hukum pasar supply and demand," ucap Khofifah.

Bila diperlukan, kata Khofifah. Pemprov Jatim juga menyiapkan operasi pasar murah sebagai langkah stabilisasi harga untuk memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Operasi pasar murah ini siap digelar di 38 kabupaten kota di Jatim.

"Stabilitas harga menjadi prioritas kami. Kami tidak ingin ada lonjakan harga yang membebani masyarakat, terutama di bulan Ramadhan ini," tambahnya.

Khofifah juga mengingatkan para pedagang dan distributor untuk tidak menimbun barang demi keuntungan pribadi. Pemerintah akan menindak tegas setiap praktik yang merugikan konsumen dan mengganggu stabilitas pasar.(lutfi,rls,ist/dya)

26 Wakil Kepala Daerah Tak Hadir di Akmil, Retret Gelombang Kedua di Jakarta

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 477 dari 503 wakil kepala daerah yang mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). Sejumlah 26 wakil kepala daerah yang absen akan diminta mengikuti kegiatan serupa pada gelombang berikutnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, sampai saat ini terdapat 477 wakil kepala daerah yang mengikuti retret. "Sisanya izin karena sakit dan lain-lain," ucapnya, Kamis (27/2/2025).

Artinya, ada 26 peserta yang absen dan tidak mengutus sekretaris daerah untuk menggantikannya. "Yang tidak datang ikut pembekalan berikutnya," tambah Bima.

Para wakil kepala daerah dijadwalkan menjalani retret selama dua hari ke depan. Pada Kamis (27/2/2025) pagi ini, mereka sudah memasuki Akmil. Sama seperti kepala daerah, mereka terlebih dulu berkumpul di lapangan Rindam IV/Diponegoro, Magelang, untuk diberangkatkan dengan bus. Kemudian, mereka turun di Wisma Sumbing, menuju Sapta Marga secara baris-berbaris, dan berjalan sampai

lokasi retret.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan retret kepala daerah gelombang kedua akan digelar di BPSDMP Kemendagri yang berlokasi di Jalan Raya Kalibata, Jakarta. Tito mempersilakan kepala daerah yang absen dalam retret saat ini dapat hadir dalam retret gelombang kedua mendatang.

"Selesai dilantik mereka juga orientasi. Orientasinya tapi bukan di sini. Orientasinya nanti di diklatnya Kemendagri namanya Badan SDM yang di Kalibata. Nah, mungkin yang 10 nanti kita akan ikut serahkan di situ saja," kata Tito di Akmil Magelang.

Tito menjelaskan, retret gelombang II sebenarnya disiapkan untuk daerah yang proses pilkadanya masih bersengketa, menggelar pemungutan suara ulang maupun yang masih rekapitulasi suara ulang. Namun Kemendagri akan mengikutsertakan 10 kepala daerah yang absen ke dalam retret selanjutnya.

"Kalau nggak mau (hari ini), nanti kita akan ikut sertakan dalam gelombang yang kedua nanti," ujarnya.

"Ruginya mereka nanti nggak seperti di sini, komprehensif materinya.

Para menteri-nya langsung di sana, nanti mungkin pejabat teknis saja dan nggak ada keuntungan untuk membuat networking, tidur sama-sama, menimbulkan emosional, bounding, hubungan emosional, nggak akan terjadi kalau di sana," sambungnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara parade senja dalam agenda retret kepala daerah di akademi militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025) Dalam kesempatan itu, Prabowo mengecek pasukan bersama Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, serta Ketua DPR RI Puan Maharani.

Adapun pemeriksaan pasukan dilakukan dengan tiga mobil maung yang telah disediakan. Puan berada di maung 2 bersama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI,



Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, berfoto bersama dengan Presiden RI saat ini Prabowo Subianto, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) hingga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pelaksana retret di Magelang. (dok.ist)

Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin.

Sementara itu, Prabowo bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo, berada di maung yang sama, yakni maung 1, yang tempatnya paling depan. Sedangkan di maung 3, diisi oleh Menko Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. (din, ist, rls, ant/dya)

Soal Ada Kams Awal Puasa Beda

Menag: Bila Ada yang Lihat Bulan, Kenapa Ditunda?



Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar

JAKARTA - Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar merespons analisis dari peneliti BRIN yang mengatakan ada kemungkinan awal Ramadan 2025 jatuh pada 2 Maret. Hal ini berbeda dengan Muhammadiyah yang telah menetapkan

kan awal puasa 1 Maret.

Nasaruddin mengatakan, siapa pun berhak untuk memprediksi awal Ramadan. "Ya, semua orang bisa memprediksi [jatuhnya awal Ramadan]," kata Nasaruddin saat ditanya jurnalis di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

Namun, Nasaruddin menegaskan keputusan terkait kepastian awal puasa akan diputuskan setelah sidang isbat yang dilaksanakan Jumat (28/2/2025) malam.

"Keputusan rapat menentukan [awal puasa] esok. Kalau ada yang yang menyaksikan bulan [hilal], kenapa harus ditunda. Kalau tidak [ada yang melihat hilal] baru kita

diskusi," ucapnya.

Sebelumnya, peneliti Astronomi dari BRIN Prof. Thomas Djamaluddin mengungkapkan analisisnya terkait posisi hilal pada 28 Februari 2025 untuk penentuan awal Ramadan 2025.

Hilal adalah bulan sabit tipis yang muncul di atas cakrawala yang muncul menjelang matahari tenggelam sebagai tanda awal bulan baru dalam kalender Hijriah.

Menurut Thomas, secara astronomis, posisi hilal belum memenuhi kriteria pada hari tersebut di sebagian besar wilayah Indonesia. Hanya Aceh saja yang memenuhi kriteria.

"Awal Ramadan ini posisi hilal yang memenuhi kriteria itu hanya di wilayah Aceh, di wilayah lain belum memenuhi kriteria," kata Thomas dalam wawancara di kanal YouTube BRIN Indonesia, Kamis (27/2/2025).

Kriteria yang dimaksud Thomas adalah kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura (MABIMS) yang disepakati tahun 2021. Kriteria ini rinciannya adalah tinggi bulan

3 derajat; Elongasi 6,4 derajat dan umur bulan: 8 Jam.

"Tingginya (bulan) memang sudah memenuhi kriteria lebih dari 3 derajat, tapi elongasinya hanya wilayah Aceh yang memenuhi 6,4 derajat, sedangkan wilayah lain belum," kata dia.

"Nah, dalam penentuan awal Ramadan 28 Februari, tinggi bulan di Aceh 4,5 derajat, elongasinya pas 6,4 derajat. Artinya sudah memenuhi kriteria," ujarnya.

Perhitungan itulah yang menyebabkan Kemenag dalam kalender resmi menuliskan bahwa 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret.

Meski demikian, perhitungan secara astronomis itu harus dikonfirmasi dalam pengamatan langsung (rukyatul hilal) pada Jumat, 28 Februari atau tanggal 29 Syakban 1446 H dalam sidang isbat Kemenag RI.

Sedangkan dalam slide yang disertakan dalam wawancara tersebut, Thomas menulis bahwa "Ada kemungkinan 1 Ramadan 1446 = 2 Maret 2025." (wid, ant, rls/dya)

Soroti Pernikahan Dini, DPRD Kota Malang: Picu Anak Tak Sekolah

MALANG - Fakta adanya anak tidak sekolah (ATS) di Kota Malang menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan legislatif. Pernikahan dini dinilai menjadi salah satu faktor utama yang disoroti. Bahkan, menikahkan anak di usia belia kerap menjadi pilihan praktis bagi sebagian orang tua ketika anaknya enggan melanjutkan pendidikan.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai fenomena ini harus segera diatasi dengan pendekatan yang lebih sistematis.

"Banyak orang tua yang berpikir sederhana, daripada anaknya tidak mau sekolah atau hanya pacaran, lebih baik dinikahkan saja. Padahal, pernikahan dini justru membawa tantangan yang lebih berat bagi anak," ujar Amithya, Kamis (27/2/2025).

Sebagai informasi, jumlah ATS di Kota Malang berdasarkan data per awal Februari 2025 telah turun menjadi 3.406, setelah sebelumnya di tahun 2024 berada di angka 5.534.

Perempuan yang akrab dengan

sapaan Mia ini, mengatakan pemerintah daerah sebenarnya memiliki banyak instrumen untuk mencegah pernikahan dini dan mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah.

Namun, sejauh ini, upaya tersebut dinilainya belum dimanfaatkan secara maksimal. "Sejak saya di komisi D dulu, kami sudah lama mendorong agar ada langkah konkret untuk menangani ini, termasuk dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat," tambahnya.

Mia menekankan, penyelesaian masalah ATS tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Sosial, pemerintah di wilayah kelurahan, serta komunitas masyarakat di tingkat RT dan RW. "Semua stakeholder harus aktif. Jadi kalau hanya mengandalkan satu atau dua pihak, hasilnya tidak akan maksimal," tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, juga mengakui jika pernikahan dini menjadi salah satu penyebab anak putus sekolah. Namun,

menurutnya ada banyak faktor yang berpengaruh. Termasuk faktor lingkungan yang berdampak besar, terutama bagi anak-anak yang sudah terbiasa bekerja dan merasa nyaman dengan penghasilannya.

"Ada anak yang sudah terlanjur nyaman bekerja, sehingga enggan kembali bersekolah. Ada juga yang menikah muda, sehingga saat kami coba ajak kembali belajar, mereka tidak diizinkan oleh pasangannya," ungkapnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Suwarjana terus mendorong program pendidikan alternatif bagi anak yang sudah putus sekolah, salah satunya melalui paket belajar. Hal ini menurutnya juga sedang menjadi konsentrasi Pemkot Malang melalui upaya penanganan ATS.



Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. (Santi/Lenteratoday)

"Mereka mungkin belum merasa butuh pendidikan hari ini, tetapi ke depan, saat ingin melamar pekerjaan, ijazah akan menjadi kebutuhan. Itulah yang coba kami dorong agar mereka tetap memiliki akses pendidikan," jelas Suwarjana. (Santi/Dya)

DBD Tembus 306 Kasus,

Pemkab Malang Perketat Pengawasan di 39 Puskesmas



Petugas melakukan fogging di wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. (dok. Dinkes Kab Malang)

MALANG - Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Malang mengalami kenaikan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, pada Januari 2025 tercatat sebanyak 306 kasus DBD, meningkat dari 245 kasus pada Januari 2024. Dinkes pun telah mengerahkan petugas surveilans di 39 puskesmas untuk memperketat pengawasan serta melakukan investigasi kasus.

Tren secara global menunjukkan kenaikan kasus DBD dan chikungunya. Kami telah meningkatkan fungsi surveilans di puskesmas agar pemantauan lebih optimal. Jika ditemukan indikasi peningkatan kasus di suatu wilayah, investigasi segera dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Kabupaten Malang, Ivan Drie, Kamis (27/2/2025).

Tak hanya DBD, Ivan menyebutkan kasus chikungunya juga mengalami peningkatan signifikan. Pada Januari 2025, tercatat 31 kasus suspek, naik hampir 50 persen dibandingkan Januari 2024 yang hanya 15 kasus suspek. Menurutnya, sepanjang tahun 2024, total kasus chikungunya di Kabupaten Malang mencapai 91 kasus suspek.

Sebagai respons terhadap

peningkatan kasus-kasus tersebut, Ivan menyampaikan pihaknya telah menerima surat edaran (SE) dari Kementerian Kesehatan yang menginstruksikan peningkatan kewaspadaan terhadap DBD dan chikungunya. Menurutnya, SE tersebut kemudian dikonsolidasikan ke seluruh jajaran, termasuk puskesmas dan rumah sakit.

Lebih lanjut, dikatakannya petugas surveilans di 39 puskesmas juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, untuk mengidentifikasi daerah yang berisiko tinggi.

Jika ditemukan kasus yang signifikan, akan dilakukan investigasi lebih lanjut guna menentukan apakah wilayah tersebut memerlukan fogging atau cukup dengan edukasi dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

"Hasil investigasi ini nantinya diklasifikasikan dalam penilaian khusus. Dari situ akan diputuskan apakah daerah tersebut perlu fogging atau tidak," jelas Ivan.

Jika diperlukan, tim tenaga kesehatan (nakes) dari Dinkes akan turun langsung untuk melakukan atau setidaknya mendampingi pelaksanaan

fogging. Namun, Ivan menegaskan fogging bukan solusi utama dalam menekan penyebaran DBD.

Menurut Ivan, cara paling efektif dalam mencegah penyebaran DBD adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) terutama sebelum musim hujan datang. Upaya ini dilakukan melalui metode 3M Plus, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, serta mendaur ulang barang bekas yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

"Sementara 'plus' dalam 3M Plus mencakup berbagai tindakan tambahan seperti memakai lotion anti nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, dan memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Justru edukasi ke masyarakat soal PSN ini sangat penting agar pencegahan lebih efektif," tegasnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala DBD, seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, mual, serta munculnya bintik merah di kulit. (Santi/Dya)

Kebakaran Hutan di Jepang, 84 Bangunan Rusak dan 1 Orang Tewas



Kawasan di sekitar kota Ofunato, Prefektur Iwate, tempat terjadinya kebakaran hutan terlihat dalam foto yang diambil dari pesawat Mainichi Shimbun "Kibo" pada, Rabu (26/2/2025). (Mainichi)

OFUNATO - Kebakaran hutan telah terjadi di Kota Ofunato di prefektur Iwate, timur laut Jepang dan belum bisa padamkan. Pejabat kota mengatakan sedikitnya 84 rumah dan bangunan lainnya rusak.

Polisi mengatakan bahwa kebakaran dimulai pada Rabu (26/2/2025) sore, dan menyebar ke beberapa distrik, termasuk Attari di Akasakicho, serta Koji dan Tahama di Sanrikucho Ryori.

Dikutip dari NHK, Kamis

(27/2/2025), kobaran api melaporkan telah membakar area seluas lebih dari 600 hektar hingga pukul 17.00, Rabu (26/2/2025).

Pihak yang berwenang Ofunato mengeluarkan perintah evakuasi untuk 2.060 orang dari 850 rumah tangga di seluruh wilayah Sanrikucho Ryori dan 54 orang dari 23 rumah tangga di distrik Attari. Satu orang dilaporkan tewas dalam kebakaran hutan ini.

"Satu mayat terbakar ditemukan

dan dibawa ke kantor polisi terdekat," kata pejabat polisi setempat kepada AFP.

Pemerintah kota mengatakan bahwa hingga pukul 22.00 Rabu, 584 orang telah berlindung di pusat-pusat pengumuman yang didirikan.

Seorang perempuan berusia 82 tahun, yang tinggal sendirian di distrik Koji, mengatakan dia keluar rumah sekitar pukul 14.00, Rabu (26/2/2025). Pasalnya ia merasa ada yang tidak menghasilkan, dan melihat rumput terbakar di ladang terdekat.

Dia mengaku melarikan diri setelah memasukkan obat-obatan dan spirit tablet meniang suaminya ke dalam ransel. Dia melihat asap mengepul dari rumahnya dan menyadari dia akan mati jika tetap tinggal di rumahnya.

Seorang warga berusia 67 tahun di distrik Ishihama mengatakan, awalnya tampak seperti kebakaran kecil, tetapi dia kemudian mengungsi saat melihat api di luar rumahnya. Dia menambahkan sama sekali tidak bisa tidur dan sangat ketakutan.

Seorang pria berusia 78 tahun, yang tinggal di lingkungannya,

mengatakan dia telah mengungsi ke tempat penampungannya, tetapi tidak bisa tidur, sehingga dia pergi untuk melihat masalah. Dia berharap kebakaran dapat segera terjadi.

Polisi dan petugas pemadam kebakaran sedang memeriksa apakah ada orang yang terluka atau yang masih bertahan di tempat.

Upaya pemadaman kebakaran sedang berlangsung di sekitar area organisasi. Helikopter Pasukan Bela Diri mulai menyiramkan udara dari udara pada Kamis (27/2/2025) pagi.

Rekaman NHK menampilkan kobaran api dan asap putih di hutan sekitar 500 meter dari rumah-rumah dan fasilitas di Sanrikucho Ryori.

Polisi memilih lalu lintas untuk menjauhkan orang-orang.

Peringatan udara kering telah dikeluarkan untuk pantai selatan Prefektur Iwate sejak 18 Februari 2025.

Di distrik Tahama, kebakaran hutan terjadi di lokasi lain di kawasan sekitar pada 19 Februari. Petugas pemadam kebakaran mengumumkan pada hari Selasa bahwa kobaran api telah berhasil dikendalikan. (AFP, NHK,ist/nei)

Wabah Campak Melanda AS, Anak di Texas Jadi Korban Pertama

WASHINGTON - Seorang anak di Texas Barat meninggal akibat penyakit campak, menurut pejabat kesehatan negara bagian, pada hari Rabu (26/2/2026).

Ini merupakan kematian pertama akibat campak di Amerika Serikat dalam satu dekade, seiring dengan meluasnya wabah di Texas yang telah mencapai lebih dari 130 kasus di dua negara bagian.

Anak tersebut, yang tidak divaksinasi terhadap penyakit tersebut, meninggal semalam di rumah sakit anak-anak, kata departemen kesehatan Texas dalam sebuah pernyataan.

"Kami menerima begitu banyak anak yang datang dan tentu saja kami tidak siap, mungkin, sejak awal akan terjadinya kematian," kata Amy Thompson, CEO Rumah Sakit Anak Covenant di Lubbock, tempat anak tersebut meninggal dalam apa yang menurut para pejabat merupakan minggu keempat wabah campak.

Dalam rapat kabinet pada hari Rabu, Robert F. Kennedy Jr, seorang kritikus vaksin yang dikukuhkan sebagai Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan awal bulan ini, mengatakan dua orang telah

meninggal dalam wabah di Texas. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan kemudian mengoreksi Kennedy, dengan mengonfirmasi satu kematian.

Setidaknya 124 orang diketahui terinfeksi di Texas Barat sejak awal Februari, semuanya kecuali lima dari mereka tidak divaksinasi dan kebanyakan dari mereka anak-anak, kata pejabat kesehatan Texas.

Sembilan kasus tambahan diumumkan pada hari Selasa di wilayah timur New Mexico, dekat perbatasan negara bagian Texas, tempat wabah telah menyebar ke sekitar 10 daerah, kata pejabat kesehatan Texas.

Pasien menunjukkan gejala seperti demam tinggi, mata merah berair, hidung tersumbat, batuk, dan ruam yang muncul di wajah, kata Lara Johnson, kepala staf medis di rumah sakit Lubbock. Anak-anak telah diobati dengan oksigen tambahan dan oksigen aliran tinggi, obat untuk demam tinggi, dan cairan infus, katanya.

Departemen kesehatan New Mexico telah memperingatkan bahwa "karena campak sangat menular,



Amy Thompson dan Lara Johnson berbicara dalam konferensi pers di Covenant Health Services setelah seorang anak yang tidak divaksinasi dan terinfeksi campak meninggal, di Lubbock, Texas, AS, Rabu (26/2/2025). (Reuters)

kemungkinan akan ada kasus tambahan."

Angka kematian akibat campak di AS, yang menyebar melalui udara melalui droplet pernapasan dari batuk atau bersin, adalah 1 hingga 3 kematian dari setiap 1.000 kasus yang dilaporkan, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS. Kematian akibat campak terakhir di AS terjadi pada tahun 2015, menurut CDC.

Seorang juru bicara Departemen Layanan Kesehatan Texas tidak bersedia memberikan komentar kepada Reuters, tetapi lembaga itu

mengatakan dalam siaran pers bahwa 18 orang dirawat di rumah sakit karena penyakit tersebut.

CDC dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan tidak menanggapi permintaan komentar.

Kennedy ditunjuk untuk memimpin HHS setelah mengatasi perlawanan dari lembaga medis dan beberapa anggota Kongres, dan telah berjanji untuk melindungi program vaksinasi yang ada. Minggu lalu, ia memberi tahu para pekerja lembaga bahwa ia berencana untuk menyelidiki jadwal vaksinasi anak-anak, di antara hal-hal lainnya. (ABC, Reuters,ist/dya)

Bunga Teratai Atasi Diare hingga Jaga Kesehatan Jantung

BUNGA teratai memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pengobatan tradisional. Kandungan antioksidan dan antiradang dalam bunga teratai terbukti efektif untuk mengobati diare dan menjaga kesehatan jantung.

Bunga teratai (lotus) sudah sejak lama digunakan dalam pengobatan dan kuliner tradisional, terutama di negara-negara Asia. Bagian yang paling sering dimanfaatkan pada tanaman dengan nama latin *Nelumbo nucifera* ini adalah akar, karena diketahui kaya akan vitamin, mineral, karbohidrat, dan serat.

Selain akar, bagian batang, biji, daun, dan bunga teratai juga bisa dijadikan sebagai bahan obat dengan cara dikeringkan, diekstrak, dijadikan teh, atau diolah menjadi bentuk bubuk atau kapsul.

Berbagai Manfaat Bunga Teratai untuk Kesehatan

Berkat kandungan nutrisinya yang melimpah, tidak mengherankan jika tumbuhan air ini dipercaya dalam mengobati berbagai penyakit dan menjaga kesehatan tubuh.

Berikut ini adalah beberapa manfaat bunga teratai yang bisa Anda dapatkan:

Mengatasi diare

Kumpulan biji yang terdapat di bagian tengah bunga teratai telah lama digunakan sebagai obat

tradisional untuk mengatasi diare. Biji teratai memiliki aktivitas antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba penyebab diare, seperti *Salmonella sp.*, *E. coli*, maupun *S. aureus*. Untuk mendapatkan manfaat bunga teratai ini, Anda cukup merendam biji bunga teratai dalam air hangat selama beberapa jam, lalu minumlah air rendaman tersebut selagi hangat. Bila perlu, tambahkan gula sesuai selera.

Menjaga kesehatan jantung

Akar bunga teratai kaya akan serat dan karbohidrat kompleks yang mampu menurunkan kadar gula dalam darah. Selain itu, akar bunga teratai juga mengandung kalium yang diketahui bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi, serta memiliki sifat antiradang yang dapat mencegah terjadinya aterosklerosis.

Kandungan-kandungan dalam bunga teratai tersebut diduga dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan menurunkan risiko terkena penyakit jantung koroner atau gagal jantung.

Mengurangi peradangan

Biji bunga teratai dipercaya dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Hal ini berkat kandungan senyawa polisakarida di dalam bunga tersebut yang memiliki efek antiradang dan antioksidan.

Manfaat bunga teratai yang satu ini sangat penting karena adanya peradangan dalam tubuh dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kronis, seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker.

Mengatasi perdarahan

Daun dan akar bunga teratai dipercaya dapat mengatasi beragam kondisi perdarahan, seperti muntah darah, mimisan, batuk darah, kencing berdarah, atau perdarahan vagina yang tidak terkait dengan siklus menstruasi. Manfaat bunga teratai yang satu ini sudah sejak lama digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok.

Menghambat penyebaran sel kanker paru-paru

Sebuah penelitian membuktikan manfaat biji bunga teratai dalam pengobatan kanker paru-paru. Potensi ini datang dari neferine, yaitu senyawa organik di dalam biji bunga teratai yang terbukti dapat membunuh serta menghambat penyebaran sel kanker paru-paru.

Selain yang telah disebutkan di atas, masih ada beberapa manfaat bunga teratai lainnya, seperti membantu meredakan batuk, mengatasi gangguan pencernaan, meredakan demam, mengatasi gangguan kulit, dan menjaga kesehatan hati.

Memiliki sifat antioksidan

Pertama, tanaman teratai banyak mengandung senyawa flavonoid dan alkaloid yang dapat berperan sebagai antioksidan yang membantu menetralkan molekul reaktif atau radikal bebas. Radikal bebas yang menumpuk pada tubuh dapat menyebabkan stres oksidatif yang merusak sel dan

berkontribusi pada perkembangan penyakit seperti kanker. Beberapa senyawa antioksidan dalam teratai termasuk kaempferol, katekin, asam klorogenat, dan quercetin. Sifat antioksidan teratai paling terkonsentrasi pada biji dan daunnya. Secara khusus, mereka memiliki efek antikanker, melindungi dari penyakit Alzheimer, dan mencegah kerusakan hati.

Manfaat bunga teratai untuk menghilangkan jerawat

Selain itu, kamu dapat mengurangi sebum berlebih penyebab jerawat dengan mengonsumsi ekstrak teratai dalam minuman teh hijau. Ini karena banyak zat antioksidan sinergis yang terkandung dalam teh hijau dan teratai.

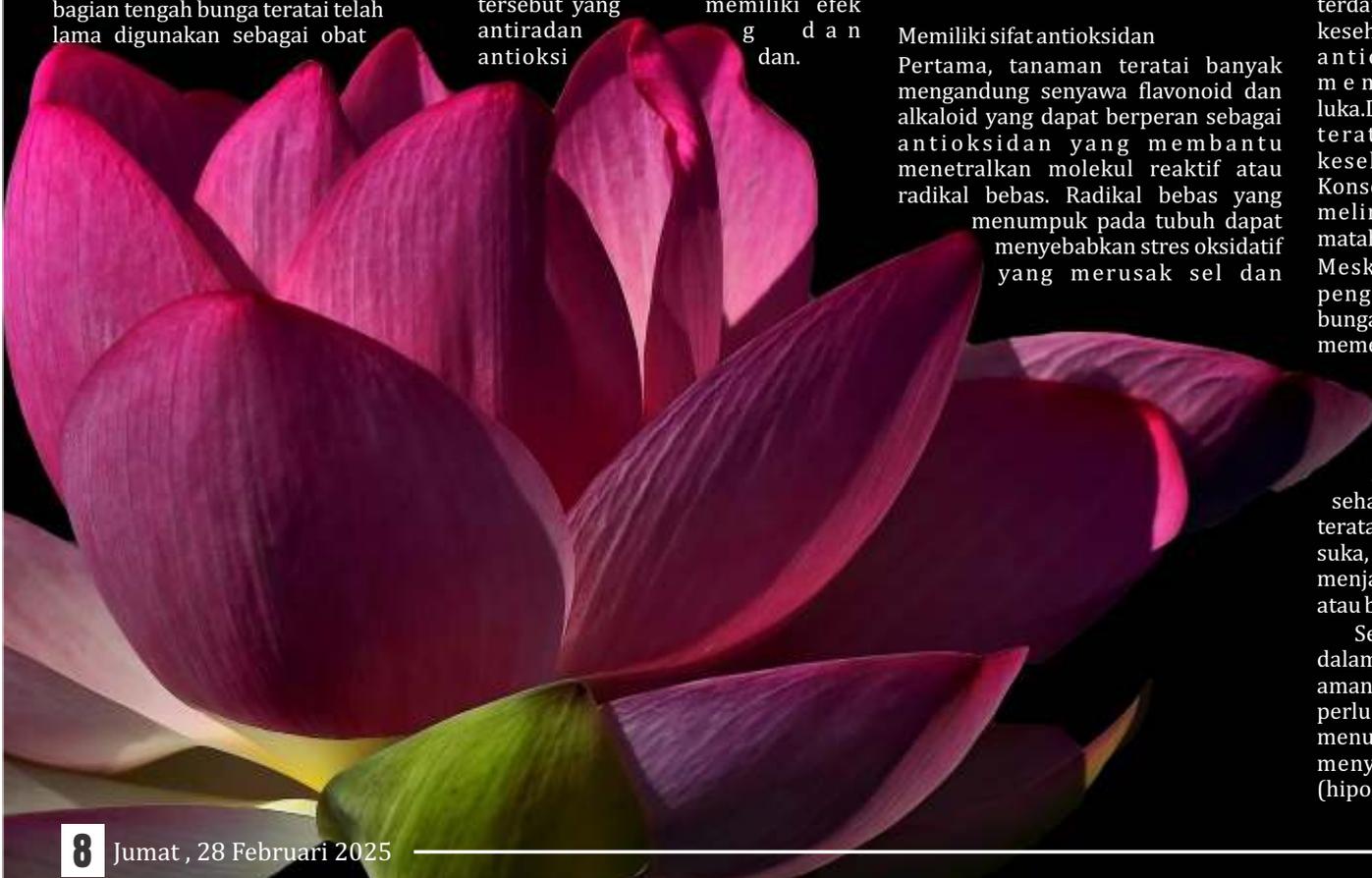
Dalam sebuah penelitian, baik monoterapi (teh hijau saja) maupun terapi kombinasi (teh hijau dan teratai), produksi sebum dapat terus menurun secara signifikan dalam 60 hari penggunaan teh hijau teratai.

Namun, kamu tetap harus merawat kebersihan wajah, seperti menggunakan obat jerawat, rajin mencuci muka, dan menghindari menyentuh wajah dengan tangan yang kotor. Dengan begitu, manfaat bunga teratai dapat bekerja secara maksimal. Menyehatkan kulit

Faktanya, vitamin A yang sering terdapat pada bunga teratai baik untuk kesehatan kulit dan rambut. Efek antioksidan vitamin A dapat membantu penyembuhan luka. Dengan begitu, manfaat bunga teratai untuk kecantikan dan kesehatan kulit telah terjamin. Konsentrasi antioksidannya dapat melindungi kulit dari sinar UV matahari dan melawan radikal bebas.

Meski banyak digunakan dalam pengobatan tradisional, manfaat bunga teratai bagi kesehatan masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya. Namun, tidak ada salahnya jika Anda ingin memanfaatkan bunga ini sebagai salah satu pilihan menu sehat. Anda dapat mengolah bunga teratai menjadi sup atau tumisan. Jika suka, bunga teratai juga bisa diolah menjadi jus dengan campuran sayuran atau buah-buahan.

Sejauh ini, konsumsi bunga teratai dalam jumlah yang wajar tergolong aman. Namun, konsumsi bunga teratai perlu diperhatikan karena berpotensi menurunkan kadar gula darah dan menyebabkan gula darah rendah (hipoglikemia). (nei,ist/dya)





PT TOP Serahkan 26 Unit Sasis Bus Mercedes-Benz ke MTrans

PT Transforma Oto Prima (TOP), dileser resmi Mercedes-Benz di Indonesia, secara resmi menyerahkan 26 unit sasis bus Mercedes-Benz OH 1626 L kepada PT Kacebe Murni Transport (MTrans) di Malang, Jawa Timur, pada Rabu (26/2/2025).

Sales Manager PT TOP Surabaya, Agus Prasetyo menyampaikan bahwa penyerahan sasis ini merupakan wujud dukungan terhadap operasional transportasi yang modern dan efisien di Indonesia.

"Sebagai dileser resmi Mercedes-Benz, kami mendukung operasional transportasi yang modern dan efisien di Indonesia, serta memperkuat ekosistem transportasi bus di tanah air," kata Agus.

Pria yang akrab disapa Pras itu menuturkan, pihaknya berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dan layanan purna jual terbaik di Indonesia.

Ia menjelaskan, sasis Mercedes-Benz OH 1626 L ditenagai oleh mesin 6-silinder OM906LA dengan tenaga 256 HP pada 2200 rpm dan torsi 900 Nm pada 1200-1600 rpm.

Selain itu, sasis ini juga telah memenuhi standar emisi Euro 4.

Menurut dia, sasis ini memastikan kenyamanan berkendara optimal melalui transmisi manual G 85 dan suspensi udara pada poros depan dan belakang.

Adapun fitur sistem pengereman yang canggih, termasuk Anti-lock Braking System (ABS) turut disematkan untuk meningkatkan keselamatan.

Sasis ini juga memiliki kapasitas



Seremoni penyerahan 26 sasis bus Mercedes-Benz OH 1626 L dari PT Transforma Oto Prima (TOP) kepada PT Kacebe Murni Transport (MTrans) yang berlangsung di Malang, Jawa Timur pada Rabu, 26 Februari 2025. (ANTARA/HO-PT TOP)

tangki bahan bakar 400 liter, serta tangki AdBlue 60 liter, untuk efisiensi bahan bakar yang lebih baik.

Sasis Mercedes-Benz OH 1626 L dikenal dengan keandalan, efisiensi bahan bakar, serta teknologi canggihnya, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan PO MTrans dan memberikan pengalaman perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

"Komitmen TOP terhadap kemajuan industri transportasi di Indonesia mendukung upaya meningkatkan mobilitas masyarakat, yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata," ujarnya.

Lebih lanjut Pras menyampaikan, sasis ini juga dirakit secara lokal sebagai wujud komitmen TOP dan Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) dalam menghadirkan solusi transportasi

yang aman, efisien, dan nyaman dengan memprioritaskan sumber daya lokal dan keberlanjutan.

"TOP berharap fitur-fitur canggih sasis Mercedes-Benz OH 1626 L dapat

membantu pengemudi dan meningkatkan kenyamanan serta keamanan penumpang, memberikan kontribusi positif bagi transportasi publik," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, CEO MTrans Rozi Yulianto mengatakan bahwa perusahaan telah menggunakan sasis Mercedes-Benz sejak 2019 karena keandalan di wilayah

Pulau Jawa dan Bali.

Dengan adanya penambahan 26 unit sasis ini, MTrans menyatakan siap memberikan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman.

Ia mengungkapkan, kinerja kendaraan Mercedes-Benz tetap optimal dalam penggunaan jangka panjang, didukung layanan purna jual berkualitas.

"Dukungan PT TOP memperkuat komitmen kami untuk menyediakan layanan transportasi terbaik. Sasis ini dirancang kokoh dengan fitur-fitur canggih yang memastikan kenyamanan dan keamanan di berbagai medan," kata Rozi.

Turut hadir dalam acara ini di antaranya manajemen PT TOP, PO MTrans, dan PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) sebagai Agen Pemegang Merek (APM) Mercedes-Benz Bus dan Truk di Indonesia. (nei,ist/dya)



Tampilan bagian depan unit armada bus PO MTrans yang bersasis Mercedes-Benz OH 1626 L - dok.istimewa



Kunjungi Istana Dinasti Joseon

Warisan Budaya dan Sejarah Korea



GELOMBANG budaya pop Korea atau Hallyu yang semakin global, berhasil membangkitkan minat wisatawan terhadap sejarah dan budaya tradisional Korea. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung ke istana Dinasti Joseon di Seoul, Korea Selatan, yang mencapai 12 juta orang pada tahun 2024, dengan 3 juta di antaranya berasal dari luar negeri.

Istana-istana di Asia Timur memiliki gaya tertentu dan memiliki banyak kesamaan. Namun, ada juga karakteristik khusus untuk setiap periode dan wilayah. Setiap dinasti di Semenanjung Korea membangun istana mereka sendiri dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan. Dinasti Joseon juga memegang kekuasaan selama lebih dari 500 tahun di istana dengan karakteristik uniknya sendiri.

Pertanyaan yang paling umum terkait istana Joseon adalah, "Mengapa terdapat banyak istana di Seoul?" Jawaban atas pertanyaan ini mungkin terlihat sederhana, namun menyiratkan alur sejarah istana selama Dinasti Joseon. Alasan mengapa Seoul menjadi lokasi bagi banyak istana berkaitan dengan sejarah panjang Dinasti Joseon, yang merupakan dinasti tunggal.

Istana Gyeongbok

Istana Gyeongbok, istana pertama dan terbesar dari lima istana utama Dinasti Joseon, berdiri sebagai simbol keagungan kerajaan. Dibangun pada tahun 1395, istana ini berfungsi sebagai istana utama dan

pusat kekuasaan Korea selama berabad-abad. Meskipun mengalami masa penghancuran dan pembangunan kembali, Istana Gyeongbok tetap menjadi representasi ikonik arsitektur tradisional Korea dan kehidupan kerajaan.

Di antaranya Paviliun Gyeonghoeru merupakan contoh utama arsitektur Joseon, dan Paviliun dan kolam Hyangwonjeong. Patung-patung di Balai Geunjeongjeon merupakan contoh teknik seni pahat era Joseon. Sisi barat area di luar Gerbang Heungnyemun ditempati oleh Museum Istana Nasional Korea, sedangkan sisi timur Paviliun Hyangwonjeong di dalam Istana Gyeongbokgung ditempati oleh Museum Rakyat Nasional Korea.

Istana Changdeok

Istana Changdeok, dibangun pada tahun 1405, merupakan istana kerajaan kedua dari Dinasti Joseon. Istana ini merupakan istana utama bagi banyak raja Dinasti Joseon, dan merupakan istana yang paling terawat dari lima istana kerajaan Joseon yang tersisa. Terkenal dengan perpaduan harmonis antara lanskap alam, terdapat t a m a n

belakang memiliki pohon raksasa yang berusia lebih dari 300 tahun, kolam kecil, dan paviliun.

Taman Istana Changdeokgung di belakang aula dalam, Huwon atau Secret Garden merupakan contoh desain taman tradisional Korea dan ruang rekreasi kerajaan. Paviliun Buyongjeong, Kolam Buyongji, Paviliun Juhamnu, Gerbang Eosumun, Aula Yeonghwadang, Gerbang Bullomun, Paviliun Aeryeonjeong, dan Aula Yeongyeongdang adalah beberapa dari banyak objek wisata yang ada di taman ini. Diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1997, Istana Changdeok terkenal dengan arsitektur tradisionalnya

Istana Changgyeong

Istana Changgyeong, dibangun pada tahun 1418 oleh Raja Sejong, raja keempat Joseon dan penemu alfabet Korea Hangeul. Istana ini untuk menghormati ayahnya, Raja Taejong yang sudah pensiun, tapi sering digunakan tempat tinggal bagi para ratu dan selir. Istana ini terkenal karena skalanya yang lebih sederhana dan intim dibandingkan dengan istana kerajaan lainnya.

Pada masa pemerintahan

Raja Seongjong (memerintah 1469-1494), istana ini direnovasi dan berganti nama menjadi Istana Changgyeonggung. Kemudian menjadi taman dengan kebun binatang dan kebun raya selama penjajahan Jepang. Lahan istana tetap seperti ini hingga tahun 1983 ketika pemugaran ke kondisi aslinya selesai dilakukan.

Istana Deoksu

Istana Deoksu terdaftar sebagai Situs Berserjarah. Awalnya bukan istana kerajaan, melainkan rumah tinggal Pangeran Agung Wolsan (1454-1488), kakak laki-laki Raja Seongjong (1469-1494) dari dinasti Joseon. Nama istana ini diubah menjadi Istana Deoksu setelah Raja Gojong turun takhta kepada Raja Sunjong pada tahun 1907.

Istana Gyeonghuigung

Terletak di pusat kota Seoul, Istana Gyeonghuigung mudah diakses oleh pengunjung. Lokasinya yang dekat dengan Museum Sejarah Seoul membuatnya menjadi bagian integral dari kawasan wisata budaya dan pendidikan di Seoul.

Istana ini dibangun untuk memberikan tempat berlindung bagi raja selama keadaan darurat dan berfungsi sebagai istana pendukung untuk Gyeongbokgung. Dibangun pada awal abad ke-17, pada masa pemerintahan Raja Gwanghaegun (1608-1623), Istana Gyeonghuigung berfungsi sebagai istana sekunder bagi raja. Nama "Gyeonghuigung" berarti "Istana Kemakmuran dan Kedamaian." (nei,ist/dya)



Kait Kelindan ... (dari Hal 1)

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) melakukan pengeledahan di tiga lokasi terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut pengeledahan dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada hari ini.

Ia menyebut lokasi geledah pertama dilakukan penyidik di rumah saudagar minyak Riza Chalid yang berlokasi di Jalan Panglima Polim, Melawai, Jakarta Selatan.

"Hari ini juga penyidik melakukan pengeledahan [di rumah Riza Chalid] dan ini sedang berlangsung di jalan Panglima Polim 2," ujarnya kepada wartawan, Kamis (27/2/2025).

Selain itu, kata dia, penyidik kembali melanjutkan geledah di kediaman Riza Chalid yang berada di Jalan Jenggala II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia menyebut hal ini merupakan kegiatan lanjutan yang digelar penyidik dan kembali disita 144 dokumen.

Harli mengatakan pengeledahan juga dilakukan di PT Orbit Terminal Merak yang berlokasi Cilegon, Banten. Ia menyebut perusahaan itu diduga menjadi lokasi tempat proses blending produk kilang jenis RON 88 Premium dengan RON 92.

Perusahaan Orbit Terminal Merak sendiri tercatat dimiliki oleh tersangka Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) yang merupakan anak kandung Riza Chalid dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

"Cilegon di satu tempat yaitu PT OTM yang diduga sebagai storage atau tempat depo, yang menampung minyak yang diimpor dan itu sekarang sedang berlangsung juga," ujarnya.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka yang terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satunya yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Kemudian SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina Internasional.

Selanjutnya MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit

Terminal Mera.

Terbaru yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan Edward Corne selaku VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga.

Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.

Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.

Jika pola kerugian ini terjadi sejak 2018, maka total kerugian negara dalam lima tahun bisa mencapai Rp 968,5 triliun. "Jadi, coba dibayangkan, ini kan tempus-nya 2018-2023. Kalau sekiranya dirata-rata di angka itu (Rp 193,7 triliun) setiap tahun, bisa kita bayangkan sebesar kerugian negara," ujar Harli.

Namun, ia menegaskan bahwa perhitungan pasti masih membutuhkan analisis lebih lanjut karena bisa saja komponen kerugian berbeda di setiap tahun.

Selain itu, faktor lain yang bisa memperbesar angka kerugian adalah distribusi BBM yang tidak sesuai spesifikasi. Jika kualitas BBM lebih rendah dari yang dibayarkan, selisih harga ini juga akan dihitung sebagai kerugian negara.

Riza Chalid Si 'Saudagar Minyak'

Nama pengusaha Riza Chalid kembali menjadi perbincangan publik setelah putranya, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018-2023.

Mohammad Riza Chalid, atau yang lebih dikenal sebagai Reza Chalid, adalah seorang pengusaha Indonesia yang menjalankan bisnis di berbagai sektor, mulai dari ritel mode, perkebunan sawit, industri minuman, hingga perdagangan minyak bumi. Berkat dominasinya dalam impor minyak, ia mendapat julukan "Saudagar Minyak" atau "The Gasoline Godfather."

Lahir pada tahun 1960, Riza aktif dalam bisnis impor minyak melalui anak perusahaan PT Pertamina, yaitu Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Pada tahun 1985, ia menikah dengan Roestriana Adrianti atau yang akrab disapa Uchu Riza.

Selama menjalani kehidupan rumah tangga, keduanya lebih banyak

menghabiskan waktu di Singapura. Pada 2004, pasangan ini mendirikan sebuah sekolah di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Kemudian, pada November 2007, mereka juga membangun tempat bermain anak. Dari pernikahan tersebut, Riza dan Uchu dikaruniai dua anak, yakni Muhammad Kerry Adrianto dan Kenesa Ilona Rina.

Nama Riza Chalid kerap dikaitkan dengan berbagai kontroversi bisnis perminyakan, khususnya terkait Petral yang berbasis di Singapura. Bisnis-nya diperkirakan menghasilkan sekitar US\$30 miliar per tahun, sementara kekayaannya ditaksir mencapai US\$415 juta. Angka tersebut menjadikannya sebagai orang terkaya ke-88 dalam daftar Globe Asia tahun 2015.

Di dunia perminyakan, Riza memiliki sejumlah perusahaan yang beroperasi di Singapura, seperti Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straits Oil, dan Cosmic Petroleum.

Selain itu, pada tahun 1997, ia pernah mewakili PT Dwipangga Sakti Prima perusahaan milik Mamiiek Soeharto dan Bambang Trihatmodjo dalam pembelian pesawat Sukhoi di Rusia. Perusahaan ini sebelumnya terseret kasus mark-up pengadaan pesawat Hercules pada 1996.

Dalam perjalanan tersebut, Riza didampingi sejumlah tokoh, termasuk Ginandjar Kartasasmita dan Jenderal Wiranto. Nama Riza juga sempat mencuat dalam kasus yang menyeret Ketua DPR RI, Setya Novanto, terkait polemik perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang emas besar yang telah beroperasi di Papua sejak 1966.

Selain itu, ia disebut-sebut memiliki peran dalam Pemilu 2014 sebagai salah satu pendukung dan penyokong dana untuk Prabowo Subianto. Bahkan, ia diduga terlibat dalam pendanaan tabloid kontroversial Obor Rakyat serta pembelian Rumah Polonia, yang menjadi markas tim sukses pasangan Prabowo-Hatta.

Keterlibatan-nya dalam berbagai isu strategis, terutama yang berkaitan dengan politik dan bisnis energi, membuat Riza Chalid menjadi sosok yang kerap dibicarakan.

Meskipun jarang muncul di hadapan publik, pengaruhnya dalam dunia perdagangan minyak serta jejaring politiknya tetap menjadi perhatian banyak pihak. Hingga kini, namanya terus dikaitkan dengan berbagai manuver bisnis yang melibatkan kepentingan besar, baik di dalam negeri maupun di lingkup internasional.

Jawab Bantahan Pertamina

Kejagung juga merespons

pernyataan Pertamina Patra Niaga soal penambahan zat aditif pada bahan bakar minyak (BBM) yang bertujuan meningkatkan kualitas produk dan memberikan manfaat bagi kendaraan, bukan untuk mengubah nilai oktan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar menyatakan pernyataan itu berbeda dengan temuan penyidik. Qohar mengatakan, penyidik menemukan adanya upaya pengoplosan research octane number (RON) untuk memproduksi BBM jenis Pertamax.

"Fakta yang ada dari transaksi RON 88 di-blending dengan (RON) 92 dan dipasarkan seharga (RON) 92," kata Abdul Qohar, kepada wartawan di depan gedung Kartika, pada Rabu (26/2/2025).

Qohar belum bisa membuktikan soal kebenaran dari RON 92 yang diduga dioplos itu. Yang jelas, kata dia, fakta-fakta penyidikan yang mengarah kepada dugaan pengoplosan merupakan hasil dari keterangan saksi dan barang bukti.

"Apakah itu nanti RON 92 atau tidak, ini ahli akan meneliti," ujar Qohar.

Sebelumnya, pelaksana tugas harian Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, buka suara soal penambahan zat aditif terhadap BBM.

Ega menjelaskan BBM yang diterima Pertamina Patra Niaga berasal dari dua sumber utama, yakni kilang dalam negeri dan pengadaan dari luar negeri. Produk tersebut sudah memiliki nilai RON yang sesuai sebelum didistribusikan.

"Baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri, itu kita sudah menerima dalam bentuk RON 92. Yang membedakan adalah, meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92, itu sifatnya masih base fuel, artinya belum ada aditif. Jadi Pertamina Patra Niaga itu mengelola dari terminal sampai ke SPBU," ujar Mars Ega, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, pada Rabu (26/2/2025).

Menurut Ega, proses penambahan aditif dilakukan di terminal-terminal Pertamina. "Jadi di terminal hanya ada proses penambahan aditif dan warna. Proses ini memberikan keunggulan dan pembeda dengan produk lain. Namun, kami tidak memiliki fasilitas untuk melakukan blending yang bisa mengubah angka oktan," katanya.

Penambahan aditif ini bertujuan meningkatkan performa mesin kendaraan dan menjaga kebersihan sistem pembakaran. "Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performa daripada produk-produk ini," tuturnya. (wid, rls, ist, ant, tpo/dya)

Kala KKP Anggap Investigasi Pagar Laut Selesai DPR Heran Kades Kohod Bisa Bayar Denda Rp 48 Miliar

JAKARTA- Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, investigasi terkait pagar laut di Tangerang berakhir. Kasus dianggap selesai setelah menjatuhkan denda kepada Kepala Desa Kohod Arsin dan stafnya yang disebut membangun pagar laut.

Hal ini memicu tanda tanya dan keheran dari para wakil rakyat. Rapat KKP bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Kamis (27/2/2025) sempat memanas.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Nasdem, Rajiv mengungkapkan keheranannya soal Kepala Desa Kohod, Arsin disebut siap untuk membayar denda Rp48 miliar sebagai pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten.

Rajiv melontarkan nada sindiran karena seorang kepala desa memiliki uang hingga miliaran rupiah. Namun, menurut dia, kesiapan Kades Kohod sebagai tindakan mulia.

"Apakah seorang kepala desa mampu bayar Rp48 miliar? mulia sekali sih kepala desa ini mau mengeluarkan uangnya 48 M untuk pagar laut," kata Rajiv dalam rapat dengan Menteri KKP di kompleks parlemen, Kamis (27/2/2025).

Sementara, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mempertanyakan kemampuan keuangan seorang kepala desa untuk membayar denda hingga miliaran rupiah.

Firman ragu seorang kepala desa memiliki kemampuan untuk memasang pagar laut hingga Rp30,16 kilometer.

"Apakah ada kemampuan seorang kepala desa memiliki uang sebegitu besar? Dan kemudian apakah ada kemampuan seorang kepala desa juga bisa memasang pagar bambu yg sampai 30,16 km tanpa alat-alat atau teknologi yg boleh dibilang agak canggih? Saya rasa tidak bisa," katanya.

Bukan hanya kepada Kades Kohod, denda juga diberikan kepada perangkat desa berinisial T. Keduanya kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim terkait dugaan pemalsuan dokumen pagar laut.

DPR pun meminta KKP melanjutkan kembali penyelidikan kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Menurut dia, hasil yang diumumkan oleh Menteri Wahyu Sakti Trenggono belum memuaskan rasa keadilan masyarakat.

"Saya minta keseriusan Pak Menteri. Jangan berhenti di sini," kata Firman.

Firman kemudian mengajak KKP melanjutkan kembali penyelidikan. Dia mengatakan Komisi IV DPR sebagai mitra pemerintah di legislatif akan membersamai prosesnya "Saya mengerti, karena jeleknya KKP adalah jeleknya Komisi IV. Oleh karena itu, mari kita bersama memberikan masyarakat jawaban yang



Personil dari KKP membawa bilah-bilah bambu yang semula terpasang sebagai pagar di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar bambu dibongkar oleh tim gabungan. Dok

meyakinkan," tuturnya.

Selain itu, Firman juga mengkritik KKP yang hanya memberikan sanksi administrasi sebesar Rp 84 miliar, penghitungan denda yang berdasarkan pada luas dan ukuran pagar laut. Menurut Firman, seharusnya KKP juga menghitung kerugian ekonomi yang ditimbulkan menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955.

Dengan hanya menghitung luasan pagarnya saja, kata dia, KKP sama saja membiarkan para pelaku kejahatan berbuat semaunya. "Alangkah melenggangnya para penjahat yang akan menjarah kekayaan negara ini," tutur dia.

Senada, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyebut penyelesaian kasus pagar laut sepanjang 30,6 Km di perairan Tangerang, Banten, tidak bisa diterima oleh nalar yang sehat. Pengungkapan identitas pemilik pagar laut oleh KKP itu terkesan ada yang ditutup-tutupi.

"Maka tidak heran kemudian penyelesaiannya pun menghina akal sehat, kenapa menghina akal sehat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri (Sakti Wahyu Trenggono) ada 196 kasus yang sudah diungkap Kementerian pelakunya semua perusahaan, bisa disebutkan Pak Menteri perusahaan apa saja, giliran pagar laut yang kokoh dan panjang pelakunya cuma inisial kan menghina akal sehat namanya," kata Alex dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama KKP di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Alex bahkan menyindir kerja Menteri KP Sakti yang memang tidak serius menyelesaikan polemik kepemilikan pagar laut tersebut. Menurutnya, Menteri KP Sakti sibuk mendeteksi ikan dan kapal hingga lupa punya tanggung jawab menuntaskan permasalahan tersebut.

Mohon izin Ibu Ketua (Ketua Komisi IV DPR Titik Hediati Hariyadi) bukan maksud ingin mengulang, tapi ini harus disampaikan, sedari awal kasus ini memang tidak masuk di akal, tidak masuk di akal karena KKP sibuk mendeteksi ikan dan kapal, luput mendeteksi pagar laut yang panjangnya 30,6 Km. Kalau minjam istilah Ibu Ketua itu setengah tol

jagorawi," ujarnya.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengingatkan kalau Komisi IV DPR, termasuk publik tidak boleh hanya terpaku pada kasus ini. Dia pun menyatakan semua pihak seolah dipaksa menerima realita bahwa kasus pagar laut memang benar-benar tidak bisa diselesaikan.

"Tapi ini realita ya Pak, tapi kita juga harus melangkah ke depan tidak mungkin lagi terpaku dengan ini terusterusan," katanya.

KKP Sebut Pelaku Perorangan

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengumumkan hasil akhir dari penyelidikan kasus pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Wahyu Trenggono menyimpulkan pemasang pagar laut tersebut bukanlah perusahaan melainkan perorangan.

Berlandaskan pada surat pengakuan, KKP menetapkan Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip, dan bawahannya yang berinisial T sebagai pihak yang bertanggung jawab atas adanya pagar laut.

"Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan berlaku," kata Wahyu Trenggono saat rapat bersama Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Atas perbuatannya, KKP memberikan sanksi denda sebesar Rp 48 miliar. Perhitungan ini disesuaikan dengan luas dan panjang pagar laut yang keduanya bangun. "Menjatuhkan sanksi, sesuai luas dan ukurannya," kata Trenggono.

Kerugian ekonomi adalah kerugian finansial yang dialami oleh individu, bisnis, atau entitas, dalam kasus ini kerugian yang dialami olen nelayan. Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Banten Fadli Afriadi membeberkeran kerugian yang dialami nelayan akibat pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang mencapai Rp 24 miliar. Angka tersebut merupakan hasil investigasi atas prakarsa sendiri (IAPS) Ombudsman Banten.

"Berdasarkan perhitungan kami, minimal kerugian yang dialami oleh hampir 4.000 nelayan itu mencapai

PEMILIK SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (HGB) PAGAR LAUT DI KAWASAN PESISIR UTARA KABUPATEN TANGERANG, BANTEN

PT Intan Agung Makmur

○ Tercatat sebagai sebagai pemilik perusahaan tersebut, PT Kusuma Anugrah Abadi dan PT Inti Indah Raya.

■ Komisaris Utama:
Freddy Numberi

■ Direktur:
Belly Djaliel

PT Intan Agung Makmur

○ Tercatat sebagai sebagai pemilik perusahaan tersebut di antaranya, PT Agung Sedayu Group, PT Tunas Mekar, Pantai Indah Kapuk 2, dan beberapa orang lain.

■ Komisaris Utama:
Kho Cing Siang

■ Komisaris:
Freddy Numberi

■ Direktur Utama:
Nono Sampono PT Cahaya

■ Direktur:
Belly Djaliel, Surya Pranowo Budihadjo Yohanes Edmond Budiman Inti Sentosa

Penegakan Hukum

1. Bareskrim menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin; Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta (UK); dan dua orang penerima kuasa untuk membuat surat palsu, SP dan CE, sebagai tersangka.

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyimpulkan pemasang pagar laut tersebut bukanlah perusahaan melainkan perorangan.

Berlandaskan pada surat pengakuan, KKP menetapkan Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip, dan bawahannya yang berinisial T sebagai pihak yang bertanggung jawab atas adanya pagar laut. Atas perbuatannya, KKP memberikan sanksi denda sebesar Rp 48 miliar.

sekarang-kurangnya Rp 24 miliar," ujar Fadli dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Senin, 3 Januari 2025.

Angka tersebut merupakan kerugian yang dialami oleh para nelayan terhitung sejak dilaporkannya kasus pagar laut pada Agustus 2024 hingga dicabut pada Januari 2025. Timnya menjumlahkan nilai kerusakan kapal akibat insiden tabrakan dengan pagar laut, berkurangnya hasil tangkapan, dan jumlah bahan bakar yang bertambah 4 hingga 6 liter solar per harinya karena harus menempuh jalan memutar dan lebih jauh dibandingkan sebelum adanya pagar laut. (wid, ant, kcm, rls/dya)